

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penguatan karakter bangsa merupakan salah satu butir Nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Komitmen ini ditindaklanjuti dengan arahan Presiden kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengutamakan dan membudayakan pendidikan karakter di dunia pendidikan. Atas dasar ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) secara bertahap mulai Tahun Ajaran 2016. Sebanyak 542 SD dan SMP se Indonesia dijadikan rintisan sekolah yang mengimplementasikan PPK, Tahun 2017 sekolah rintisan PPK akan bertambah menjadi 1.626 SD dan SMP, yang diharapkan dapat memberikan dampak kepada 9.830 sekolah di sekitarnya. Tahun 2020 diharapkan semua sekolah sudah mengimplementasikan PPK. Tapi di SMA/SMK tidak disebutkan, karena diharapkan sudah selesai pada jenjang Pendidikan Dasar. Di sisi lain kurikulum 2013 menekankan penguatan pendidikan karakter. Menurut Mendikbud, Prof. Muhadjir Effendy, M.AP, pendidikan karakter akan difokuskan pada jenjang sekolah khususnya di SD dan SMP. Disebutkannya, 70% kegiatan belajar mengajar di SD dan 60% di SMP akan didominasi pendidikan karakter; sisanya, 30% kegiatan belajar mengajar di SD dan 40% di SMP merupakan porsi pendidikan akademis. (Effendy, 2017). Sementara porsi Pendidikan Akademik di SMA/SMK 60%, sisanya 40% untuk Pendidikan Karakter.

Pertanyaannya, karakter apa saja yang perlu dikembangkan di sekolah? Jika mengacu kepada UUD 1945 Amandemen dan UUSPN Tahun 2003 tentang tujuan pendidikan nasional, terdapat 10 nilai/karakter yang perlu dikembangkan oleh sekolah, yakni: keimanan (kepada Tuhan Yang Maha Esa), ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi WNI yang demokratis, dan menjadi WNI yang bertanggungjawab. Adapun Direktorat Pembinaan SMP (2010) merumuskan sebanyak 18 nilai/karakter yang perlu dihidupkan di sekolah, yakni: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air,

menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Lalu, bagaimanakah karakter siswa SMA? Perlu diadakan penelitian. Adapun penelitian yang diusulkan melalui tesis ini adalah karakter kejujuran.

Mengapa studi kejujuran? Fenomena ketidakjujuran dalam duawarsa terakhir ini cukup mencolok mata. Masalah ketidakjujuran di negeri ini sudah sedemikian parah. Korupsi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih tinggi melanda hampir seluruh lapisan masyarakat. Bukan hanya dilakukan oleh para birokrat, para pejabat, anggota DPR-DPRD, dan pengusaha saja tapi dilakukan juga oleh para PNS muda sekalipun. Di dunia pendidikan (khususnya di sekolah dan perguruan tinggi) dikenal fenomena menyontek dan plagiat. Beberapa pengamat politik, ekonomi, dan hukum di televisi dan di harian-harian ibu kota mengungkapkan bahwa para koruptor muda dewasa ini lebih berani dan lebih rakus dalam melakukan korupsinya. Dunia sekolah dan universitas pun tidak luput dari fenomena tidak jujur. Sejak diimplementasikannya sistem ujian nasional (sejak Ebtanas hingga UN) telah terjadi rekayasa proses dan hasil ujian agar para siswa lebih banyak yang lulus dan memperoleh nilai tinggi. Tapi dengan UN berbasis komputer, paling tidak dalam proses ujiannya sangat sulit terjadinya plagiat; walau masih ditemukan pula adanya ketidakjujuran. Tapi fenomena ketidakjujuran tetap saja masih mendominasi masyarakat Indonesia. Pendidikan kejujuran perlu mendapat prioritas dalam pembinaan karakter di sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Hasil-hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh pendidikan dan suasana keagamaan dan karakter terhadap ketaatan beragama dan perilaku berkarakter atau berakhlakul karimah (akhlak mulia). Direktur Pembinaan SMP mengutip hasil penelitian di Harvard University Amerika Serikat, bahwa kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (*hard skill*) saja, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain (*soft skill*). Penelitian ini mengungkapkan, kesuksesan ditentukan hanya sekitar 20 persen oleh *hard skill* dan sisanya 80 persen oleh *soft skill*. Bahkan orang-orang tersukses di dunia bisa berhasil dikarenakan lebih banyak didukung kemampuan *soft skill* daripada *hard skill*. *Soft skill* merupakan bagian keterampilan dari seseorang yang lebih bersifat pada kehalusan atau sensitivitas perasaan

seseorang terhadap lingkungan di sekitarnya. Mengingat *soft skill* lebih mengarah kepada keterampilan psikologis maka dampak yang diakibatkan lebih tidak kasat mata namun tetap bisa dirasakan. Akibat yang bisa dirasakan adalah perilaku sopan, disiplin, keteguhan hati, kemampuan kerja sama, membantu orang lain, dan lainnya. *Soft skill* sangat berkaitan dengan karakter seseorang (Direktorat Pembinaan SMP, 2010). Penelitian akan mengungkap masalah mendasar program Pendidikan kejujuran di SMA.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003) telah berhasil merumuskan tujuan pendidikan yang kaya dengan dimensi agama dan moralitas. Dalam Bab II pasal 3 disebutkan: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003). Pada bidang keagamaan, tujuan pendidikan pun lebih dikembangkan. Perubahan keempat UUD 1945 pasal 31 ayat (3) disebutkan, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan “keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia” dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang (MPR RI, 2000). Pada UUD 1945 yang belum diamendemen, ungkapan demikian (meningkatkan “keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia”) tidak ada (BPUPKI, 1945). Kata-kata iman dan takwa (tanpa akhlak mulia) hanya tertuang dalam GBHN sejak Repelita pertama (MPR RI, 1997). Hal ini menunjukkan bahwa kalangan elit (dalam hal ini MPR) sebenarnya merasa resah dengan kondisi pendidikan bangsanya sendiri, sekaligus menghendaki jatidiri bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dilihat dari segi tujuannya, bangsa Indonesia menghendaki kaum terpelajarnya bukan sekedar berilmu, cakap, dan kreatif (dimensi intelektualitas), tapi juga beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (dimensi religiusitas), berakhlak mulia (dimensi karakter dan moral), dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung-jawab (dimensi kebangsaan).

Tetapi dalam pelaksanaannya belum sebaik dengan apa yang tertuang di dalam perundang-undangan itu. Aspek religi dan nilai-nilai masih terpinggirkan. Unsur pendidikannya terlepas dari unsur pengajaran. Jumlah jam mata pelajaran agama dan moralitas sangat minim. Tilaar (1999: 99) menyebut pendidikan agama dalam kurikulum nasional Indonesia hanya sebagai penggembira saja, sekedar tidak dikritik sekuler oleh kalangan Ulama.

Praktek pendidikan di Indonesia menurut sejumlah pakar lainnya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan praktek pendidikan di Barat di mana manusia mengejar ilmu pengetahuan dengan asumsi bahwa ilmu itu bebas nilai (*value free*). Suriasumantri (1990: 12-13) mengatakan bahwa tadinya ilmu pengetahuan hanya mempelajari alam apa adanya tanpa ada keterkaitan dengan nilai moral. Ilmu hanya untuk ilmu, tanpa dikaitkan dengan agama, ideologi dan nilai-nilai luhur. Keberhasilan pendidikan seseorang hanya dilihat dari pencapaian akademis semata. Sejalan dengan Suriasoemantri, Sanusi (2004) mengatakan bahwa pendidikan yang dewasa ini sedang berlangsung sangat dipengaruhi oleh logika positivisme; yakni logika yang hanya berorientasi pada keadaan dunia *here and now* yang dapat diindra oleh manusia. Pandangan ini mengakibatkan manusia menjadi sekuler dan hanya memikirkan masalah-masalah yang sifatnya dapat dijelaskan secara empiris dan melupakan masalah-masalah yang berkaitan dengan nilai luhur. Inilah awal dari didewakannya kemampuan nalar. Demikian juga Soemantri (2001: 4) mengemukakan bahwa keadaan di mana manusia menjauhkan diri dari agama merupakan sebagai hasil dari pengaruh budaya *Hellenisme*. Pengaruh budaya ini akal mengalahkan agama (*intellectus quaerrens fidem*). Dikatakannya bahwa budaya *Hellenisme* merupakan budaya yang mendorong berkembangnya rasionalitas, individualisme, dan melepaskan diri dari agama/teologi. Padahal Zohar & Marshall (2000: 11) menyatakan bahwa diskusi tentang intelegensi manusia tidak akan lengkap tanpa menyertakan *spiritual Intelligence* –SQ. Kecerdasan ini (SQ) bisa menjawab masalah-masalah tentang makna dan nilai; dengan intelegensi ketiga ini kita bisa menempatkan tindak-tanduk dan hidup kita dalam konteks pemaknaan yang lebih luas dan lebih kaya; bisa menilai apakah suatu kejadian atau pengalaman hidup itu lebih berharga atau tidak dari yang lainnya. SQ merupakan fondasi yang diperlukan bagi keefektifan kedua fungsi IQ dan EQ. Selanjutnya

Soemantri (2001: 4) mengatakan bahwa budaya *hellenisme* ini mempengaruhi dunia pendidikan sampai sekarang ini, termasuk pada ilmuwan, pendidik, penulis buku teks yang membanjiri perpustakaan, khususnya perpustakaan-perpustakaan yang terdapat di universitas.

Jika mengacu kepada UUD 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional Indonesia seharusnya sarat dengan pembelajaran yang berdimensi agama dan moralitas/karakter. Tetapi realitasnya masih jauh dari yang diharapkan. Fasih membaca Al-Quran, mengerjakan shalat lima waktu, dan berakhlak mulia merupakan tujuan pendidikan (khususnya pendidikan agama) dalam berbagai kurikulum nasional (sejak Kurikulum 1985, terutama Kurikulum 2013), yang sebagiannya dapat terukur. Misalnya, mahir membaca Al-Quran diharapkan dapat dicapai oleh siswa SD, walau kenyataannya di SMP dan SMA pun masih menjadi bagian dari kurikulum Pendidikan Agama Islam. Tetapi bagaimanakah kemampuan peserta didik dalam keterampilan dasar ini? Berdasarkan survey di beberapa sekolah dan universitas di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Tasikmalaya siswa SD, SMP, SMA, dan mahasiswa tingkat pertama yang bisa membaca Al-Quran masih lebih sedikit (masing-masing 10%, 25%, 35%, dan 40%). Itu baru dari segi kemampuan membaca Al-Quran (Tim PPBQ, 2005). Belum lagi diukur secara lebih luas dan mendalam, misal pemahaman dasar-dasar agama, pemahaman Al-Quran, dan pengamalan beragama.

Bila substansi keberagamaan adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, kita amati hal-hal yang bersebrangan dengan kriteria keberagamaan. Para siswa begitu mudah terkena sugesti negatif dan begitu mudah marah. Tawuran pelajar akhir-akhir ini merupakan fenomena biasa. Malah akhir-akhir ini tawuran antar mahasiswa. Lebih melebar lagi tawuran pelajar dengan masyarakat, mahasiswa dengan masyarakat, maniak sepak bola dengan masyarakat, tawuran antar masyarakat, tawuran antar kampung, hingga tawuran masyarakat dengan petugas keamanan. Kasus penyalahgunaan narkoba dan zat-zat adiktif (NAPZA) sudah memasuki (hampir) semua SMP-SMA/SMK. Pergaulan bebas siswa-siswi sudah dipandang sebagai ciri pergaulan remaja dan ABG. Sikap tidak hormat anak muda bukan hanya ditunjukkan kepada sembarang orang, bahkan juga terhadap

guru-gurunya. Penghormatan dan bakti pada kedua orang tua pun memudar. Vandalisme sudah merupakan ciri pelajar kita; dan premanisme tumbuh subur hingga di lingkungan persekolahan. Kejujuran yang sangat didambakan sudah hilang dari kamus persekolahan. Fenomena menyontek dan joki sepertinya fenomena biasa yang disalahkan sekaligus dilanggar oleh semua pihak. Salah untuk orang lain, tetapi boleh untuk saya; salah untuk sekolah lain, tetapi boleh untuk sekolah saya. Sepertinya kamus ini yang dipakai sekarang. Masyarakat biasanya memandang perbuatan tersebut sebagai perbuatan a-moral, pelanggaran etis, dan penyimpangan beragama yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak taat beragama, walau perbuatan tersebut dilakukan secara komunal oleh orang-orang yang mengaku beragama; bahkan sering dianggap sebagai fenomena biasa. Padahal yang lebih penting lagi adalah perlunya dicari solusi bagaimanakah mendekatkan praktek pendidikan dengan perundang-undangan, jangan sampai praktek pendidikan itu mengkhianati amanat perundang-undangan.

Hasyim (1988) melalui Tesis Magisternya di IKIP Bandung/UPI (1988) tentang tindakan pelanggaran etis menemukan, bahwa sekolah-sekolah yang kaya dengan nuansa dan pembelajaran agama berpengaruh positif terhadap perilaku moral para siswanya. Dengan mengambil sampel 5 Madrasah Aliyah (MA) dan 5 SMA di Sumatera Selatan Adelina Hasyim menyimpulkan bahwa, responden siswa SMA lebih banyak melakukan pelanggaran etis ketimbang responden siswa MA.

Director of the Institute of Sathya Sai Education, Thailand, melalui disertasi dan riser-riset pasca disertasi mengembangkan model pembelajaran nilai-nilai kemanusiaan terpadu. Makna terpadu perspektif Na-Ayudya adalah pengintegrasian 5 nilai (kebajikan, kebenaran, kedamaian, kasih sayang, dan tanpa kekerasan) ke dalam seluruh mata pelajaran melalui sikap dan tindakan guru yang damai dan pengasih, latihan pengembangan indera ke-6 (intuisi) dan pikiran super sadar melalui meditasi dan perenungan lainnya serta penataan lingkungan (sekolah, keluarga dan institusi masyarakat) yang sama-sama mengembangkan ke-5 nilai tersebut. Untuk membudayakan pendidikan nilai ini dilakukan pelatihan intensif selama 10 minggu. Disebutkannya, bahwa sekolah-sekolah yang menerapkan model pendidikan nilai ini (di sekolah-sekolah Satya Sai) berhasil menciptakan siswa yang memiliki budi pekerti yang baik (damai, cinta kasih, dan tidak ada

kekerasan) (Na-Ayudya, 2008). Belum dilakukan penelitian jika dalam keadaan hidup tidak normal (misal: ketika ditimpa musibah, sakit, kehilangan harta, ditinggal mati oleh orang yang dicintainya) apa akhlak/karakternya tetap istiqomah/konsisten? Sebabnya, akhlak/karakter yang telah benar-benar menjadi akhlak/karakter haruslah tetap dan otomatis dalam situasi apa pun karena telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari dirinya, sudah mempribadi (Miskawaih, 1994: 3). Kalau tidak demikian maka bukanlah akhlak/karakter.

Rahmat (2010) dalam disertasi dan pasca disertasi mengadakan studi kualitatif dan kuantitatif tentang pendidikan insan kamil (manusia sempurna). Hasilnya menemukan bahwa, secara filosofis-antropologis baik konsep maupun implementasi pendidikan di Indonesia selama ini memiliki kelemahan mendasar karena tidak mungkin terlaksananya pendidikan secara utuh. Pendidikan yang utuh (untuk mencapai al-insan kamil) seharusnya mengembangkan seluruh unsur manusia, yakni raga, hati, roh, dan rasa (*sirr*). Saat ini unsur manusia yang dikembangkan dalam pendidikan di Indonesia hanyalah raga (jasmani) dan akal (intelekt)-nya, padahal akal hanyalah “alat” hati atau tentaranya hati (bukannya unsur manusia). Jika hatinya baik, maka akal pun akan memikirkan hal-hal yang baik; tapi jika hatinya buruk, maka akal pun akan memikirkan hal-hal yang buruk (sesuai perintah hati). Oleh karena itu pendidikan karakter seharusnya berangkat dari pendidikan “hati”. Tapi hati pun ada dua, yakni hati nurani (hati yang baik, karena mendapat Cahaya Ilahi) dan hati sanubari (hati yang buruk, atau nafsu). Pendidikan karakter seharusnya mengembangkan hati nurani dan mengeliminasi atau sekurang-kurangnya mengurangi peran hati sanubari. Saran yang diajukan oleh Rahmat agar pendidikan agama/akhlak/karakter seharusnya berbasis karakter inti. Adapun di sekolah pada umumnya, baik pembelajaran karakter maupun pembudayaannya oleh pihak sekolah hanya menekankan karakter instrumental.

Penelitian tentang kejujuran telah dilakukan. Pertama pada mahasiswa UPI, bahwa kejujuran mahasiswa berada pada level “sedang”. Disebutkannya, mahasiswa UPI kadang-kadang berkata dan bertindak benar dan kadang-kadang berkata dan bertindak dusta. Mereka pun kadang-kadang menepati janji dan kadang-kadang mengingkari janji. Mereka pun kadang-kadang memagang amanah jika diberi amanah tapi kalau ada kesempatan merekapun khianat. Mereka pun

kadang-kadang berlaku fair dan kadang-kadang berlaku curang. Hanya segelintir mahasiswa saja yang lebih condong jujur. Disebutkan juga, bahwa dengan model pembelajaran Targhib-Tarhib (hukuman-ganjaran alami dan ukhrawi) tingkat kejujuran mahasiswa meningkat (Rahmat & Fahrudin, 2014). Kedua, penelitian pada siswa SMP/MTs di Jawa Barat. Dalam penelitian ini kejujuran merupakan salah satu unsur dari religiusitas (kredial, ritual, dan moral). Religiusitas siswa SMP/MTs berada pada level “sedang”. Adapun siswa sekolah-sekolah negeri lebih tinggi religiusitasnya ketimbang siswa sekolah-sekolah swasta (Rizal & Rahmat, 2018). Ketiga, disertasi Arif (2017) pada program studi Pendidikan Umum/Nilai SPs UPI. Arif mengadakan studi tentang budaya kejujuran dan tingkat kejujuran siswa SMA dan SMK di Kuningan (Jawa Barat). Hasilnya, sekolah telah membudayakan kejujuran. Didirikan juga di sekolah itu Kantin Kejujuran. Adapun tingkat kejujuran siswa SMA/SMK berada pada level “sedang”. Artinya, hasil penelitian ini relatif sama dengan penelitian di SMP dan perguruan tinggi. Adapun secara umum, siswa SMP/MTs lebih tinggi tingkat kejujurannya dibandingkan dengan siswa SMA/SMK dan mahasiswa.

Untuk menguji tingkat kejujuran, Lickona (2004 : 15) telah melakukan yang ia sebut “*Lost Wallet Experiment*”. Eksperimen ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kejujuran berdasarkan jumlah dompet hilang yang kembali. Caranya dia menyebarkan 1100 buah dompet yang sengaja dijatuhkan di berbagai sudut kota di berbagai negara. Setiap dompet berisi uang sebesar 50 dolar beserta kartu nama dan nomor telepon pemiliknya. Di kota-kota tersebut, para relawan pura-pura menjatuhkan dompetnya, lalu ia duduk ditempat yang tidak terlalu jauh dan mengamati apa yang terjadi dengan dompet tersebut. Hasilnya 56% dompet kembali dan 44% dibawa pergi. Tapi, prosentase satu negara dengan negara yang lain berbeda secara tajam. Tingkat kejujuran paling tinggi didapatkan oleh Norwegia dan Denmark yang dompetnya 100% kembali. Paling rendah adalah Italia dengan 35%, Swiss 35%, Hongkong 30% dan Meksiko 2%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kultur tiap negara menentukan karakter warganya. Pelajaran yang dapat ditarik adalah, jika kita dapat menumbuhkan nilai jujur pada suatu lembaga, maka akan berpengaruh kepada warganya tersebut.

Selain dalam Pancasila, Allah SWT sudah lebih dahulu mengingatkan agar kita sebagai hamba-Nya bersikap jujur dan memelihara kejujuran seperti yang tertera dalam surat Al-Ahzab: 70 – 71 Allah SWT berfirman: “*Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.*”

Dalam ayat tersebut telah jelas bahwa jika kita berbuat jujur amalan-amalan kita yang lain akan baik. Hal ini terjadi karena kejujuran akan membawa ketenangan dan membuat kita termotivasi dan merasa terawasi untuk selalu berperilaku dan bersikap baik, tidak hanya jujur saja. Dia pun berkata akan memperbaiki amalan-amalan manusia yang berkata benar (jujur).

Menurut Abdullah (2008 : 105), kejujuran adalah salah satu pilar karakter yang sangat penting. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur artinya lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, serta tulus ikhlas. Mengartikan jujur dengan sikap lugas, apa adanya, yang tidak dicampuri dengan kebohongan-kebohongan. Sedangkan dalam buku Pedoman Pendidikan Karakter (2010 : 9), dinyatakan bahwa jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan.

Dalam bahasa Inggris, kejujuran sepadan dengan kata *Honesty*. Peterson dan Seligman (2004 : 249) mengartikan kejujuran dengan *factual truthfulness and interpersonal sincerity*. Dalam hal ini, jujur belum tentu dapat dipercaya. Jujur baru satu nilai. Ia jalan menuju amanah. Amanah artinya bisa dipercaya, orang yang punya kredibilitas. Maknanya jadi lebih lengkap, lebih luas dan esensial sifatnya (Sudewo, 2011 : 86).

Kejujuran sangat diperlukan dalam proses belajar siswa, dengan kejujuran belajarnya tinggi akan berusaha bertanggung jawab untuk kemajuan prestasinya, mengatur diri sendiri memiliki inisiatif dan memiliki dorongan yang kuat untuk terus mengukir prestasinya. Ketika peserta didik belajar dengan kemauannya sendiri, mereka mengembangkan kemampuan memfokuskan dan merefleksikan. Bekerja atas kemauan sendiri juga memberi mereka kesempatan bertanggung jawab secara pribadi terhadap belajarnya. Siswa akan lebih meresapi dan memahami

pembelajaran karena belajar tanpa paksaan. Sikap kejujuran sangat perlu ditumbuhkan kembangkan dalam diri siswa terkait prestasi belajarnya.

Nasution (1996 : 17) mengemukakan prestasi belajar merupakan kesempurnaan yang dicapai seseorang dalam berpikir, merasa dan berbuat. Prestasi belajar dikatakan sempurna apabila memenuhi tiga aspek yakni: kognitif, afektif dan psikomotor, sebaliknya dikatakan prestasi kurang memuaskan jika seseorang belum mampu memenuhi target dalam ketiga kriteria tersebut.

Dalam mengkaji hubungan kejujuran dengan prestasi nilai belajar, dapat dilihat dari prestasi belajar siswa dalam buku rapor yang ditunjukkan dalam bentuk nilai prestasi. Prestasi belajar yang tercantum dalam rapor sudah memberikan informasi kemampuan siswa dalam berbagai aspek terutama aspek kognitif dan psikomotor, sedangkan sikap kejujuran merupakan aspek afektif yang timbul atas sebagian pandangan siswa terhadap prestasi belajar siswa.

Berdasarkan paparan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Hubungan Tingkat Kejujuran dan Argumen Kejujuran dengan Prestasi Belajar Siswa SMAN di Kota Bandung”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari paparan yang telah dikemukakan maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu “Bagaimanakah hubungan korelasional kejujuran dan argumen kejujuran dengan prestasi belajar siswa SMAN di Kota Bandung?”

Pertanyaan utama di atas dapat dirinci menjadi beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tingkat kejujuran siswa SMAN di Kota Bandung?
2. Bagaimanakah argumen kejujuran siswa SMAN di Kota Bandung?
3. Bagaimanakah prestasi belajar siswa SMAN di Kota Bandung?
4. Bagaimanakah hubungan korelasional antara tingkat kejujuran dan argumen kejujuran dengan prestasi belajar pada siswa SMAN di Kota Bandung?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian secara umum bertujuan mendeskripsikan hubungan korelasional antara kejujuran dan argumen kejujuran dengan prestasi belajar siswa SMAN di Kota Bandung.

Adapun secara khusus dan operasional penelitian bertujuan untuk mengetahui :

1. Tingkat kejujuran siswa SMAN di Kota Bandung.
2. Argumen kejujuran siswa SMAN di Kota Bandung.
3. Prestasi belajar siswa SMAN di Kota Bandung.
4. Hubungan korelasional antara tingkat kejujuran dan argumen kejujuran dengan prestasi belajar pada siswa SMAN di Kota Bandung.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat dalam memperluas pengetahuan dibidang pendidikan yang terkait dengan kejujuran siswa, argumen kejujuran siswa yang benar dan nilai prestasi belajar siswa. Dengan ditemukannya penelitian ini, teori kejujuran akan lebih kaya yakni ditemukannya tingkat kejujuran, argumen kejujuran serta hubungan dengan prestasi belajar pada jenjang SMA.

1.4.2 Manfaat Praktis

Mengungkapkan hubungan tingkat kejujuran, argumen kejujuran dan prestasi belajar siswa SMAN di kota Bandung. Sehingga perencanaan untuk peningkatan kejujuran siswa dapat terarah. Dapat menyajikan masalah yang patut mendapat perhatian dalam rangka mengembangkan kejujuran siswa dan meningkatkan wawasan, pengetahuan yang berkaitan dengan prestasi.

Hasil penelitian ini bisa digunakan untuk pembinaan sekolah yakni :

1. Siswa :
Untuk mengetahui dan menyadari akan kejujurannya.
2. Kepala sekolah :
Untuk menyusun perencanaan, pembudayaan dan evaluasi program kejujuran di sekolah.

3. Guru :

Terutama guru PAI dan PKN dengan ditemukannya hasil pada penelitian ini dapat membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kejujuran dengan tepat sasaran.

4. Orangtua siswa :

Hasil penelitian ini perlu disosialisasikan oleh sekolah kepada orangtua siswa untuk pembinaan kejujuran di rumah.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memenuhi lebih jelas sistematika penulisan ini yang berjudul hubungan tingkat kejujuran siswa, argumen kejujuran dan prestasi belajar siswa SMAN di kota Bandung, dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I sebagai bab pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II meliputi kajian pustaka yang terdiri dari tingkat kejujuran siswa, argumen kejujuran siswa dan prestasi belajar siswa sebagai kajian pendidikan umum, penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka pemikiran penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III metodologi penelitian meliputi lokasi, metode, prosedur penelitian.

BAB IV merupakan bab yang menunjukkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kejujuran dan argumen kejujuran dengan prestasi belajar. Adapun bab terakhir, Bab V, meliputi kesimpulan dan rekomendasi sesuai dengan hasil penelitian.